

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) mengawali tahun 2025 dengan deflasi tipis sebesar 0,06% pada Januari 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Meskipun deflasi terbilang kecil, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan harga secara umum di provinsi ini, yang tercermin dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) yang tercatat sebesar 106,11.

“Deflasi yang terjadi di NTT secara keseluruhan dipengaruhi oleh turunnya harga pada dua kelompok pengeluaran utama, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun sebesar 9,16%, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami penurunan sebesar 0,49%. Penurunan harga ini berkontribusi pada deflasi yang tercatat pada Januari 2025”.

Di tengah dinamika harga barang dan jasa secara nasional, Kota Kupang mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan inflasi year-on-year (Y-on-Y) terendah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2025, yakni hanya sebesar 0,91 persen. Pada April 2024, inflasi month-to-month (m-to-m) kita cukup tinggi, yakni 1,39 persen. Maka secara teknis, karena lonjakan harga waktu itu sudah tinggi, indeks harga konsumen (IHK) April 2025 tidak jauh berubah

Di Kabupaten Manggarai Timur sendiri, tercatat perkembangan inflasi yang tercermin melalui volatilitas harga barang kebutuhan pokok masih terjaga dan terkendali, permintaan terhadap barang komoditas pokok masih stabil dan berjalan normal. Risiko ke depan yang mungkin di hadapi oleh Kabupaten Manggarai Timur adalah risiko terhadap kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok akibat cuaca ekstri/curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadinya gagal panen komoditas jagung dan beberapa komoditas lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya ketersediaan stok di pasaran sehingga menyebabkan kondisi harga barang kebutuhan pokok akan terganggu.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Rendahnya konektivitas jaringan distribusi. Rendahnya konektivitas yang dimaksud adalah permasalahan konektivitas terutama dihadapi oleh daerah-daerah di pedalaman yang memiliki tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi.
- Kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi atau *assymmetric information* antar pelaku di tengah panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di
- Distorsi struktur Distorsi struktur pasar ditimbulkan akibat adanya beberapa komoditas strategis yang terdistorsi menyebabkan adanya kekakuan dalam perilaku pembentukan harga
- Produktivitas pangan. Kondisi iklim dan cuaca yang cenderung panas hampir di seluruh daerah di Provinsi NTT menjadikan lahan di Provinsi NTT bersifat kering dan tandus, sehingga sangat mempengaruhi kesuburan tanah dan produktivitas pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kabupaten Manggarai Timur terus berkoordinasi, bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank

Indonesia, Dinas dan OPD terkait, stakeholders, maupun lembaga dan instansi vertikal lainnya. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah, Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki peta jalan (roadmap) sebagai arah kebijakan pengendalian inflasi. Termasuk, guna menjaga stabilisasi inflasi di daerah, Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki program unggulan yang bekerjasama dengan beberapa instansi, lembaga dan stakeholders terkait lainnya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam program yang telah dituliskan dalam peta jalan pengendalian inflasi di daerah, sebagai evaluasi atas kebijakan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2025 secara rutin setiap bulannya mengikuti Rapat Koordinasi TPID Pusat dan Daerah dan telah beberapa kali melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah Bersama BULOG dalam rangka mengendalikan kenaikan harga bahan pokok khususnya beras.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan Kerjasasama Antar Daerah
2. Melanjutkan Program Unggulan Kampung Inseminasi Buatan
3. Melaksanakan pemantauan harga komoditas bahan pokok
4. Melaksanakan program sidak pasar dan pasar murah
5. Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan akses (jalan, jembatan, pelabuhan) antar kabupaten/ kota.